

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil analisis deskriptif memberikan gambaran rata-rata skor untuk kategori persepsi variabel perencanaan adalah 81,45%, variabel pelaksanaan adalah 84,06%, variabel penatausahaan adalah 84,53%, variabel pelaporan dan pertanggungjawaban adalah 84,05%, dan variabel akuntabilitas adalah 82%.
2. Variabel perencanaan(X_1) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dengan nilai uji t sebesar 3,791 dan tingkat signifikan 0,008, variabel pelaksanaan dengan nilai uji t sebesar 2,462 dan tingkat signifikansi 0,014, variabel penatausahaan dengan nilai uji t sebesar 2,791 dan tingkat signifikansi 0,021 dan variabel pelaporan dan pertanggungjawaban dengan nilai uji t sebesar 5,855 dan tingkat signifikansi 0,000
3. Hasil uji R Square menunjukkan kontribusi variabel bebas yakni variabel perencanaan, variabel pelaksanaan, variabel penatausahaan dan variabel pelopran dan pertanggungjawaban sebesar 0,576 atau sebesar 57,6% dan sisanya 42,4% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis penelitian, hasil pembahasan, dan kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan, yaitu :

1. Bagi aparatur pengelola keuangan dana desa di Kecamatan Semau disarankan agar dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan melakukan pelatihan, peningkatan kapasitas aparatur kepada seluruh aparatur pengelolaan keuangan desa melalui bimbingan teknis secara rutin tentang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa.
2. Pemerintah daerah dalam hal ini dinas terkait (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) turut berperan serta melakukan pendampingan pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan, pengelolaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban
3. Pemerintah Desa wajib menyampaikan informasi secara transparan terhadap sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) atas kegiatan-kegiatan yang didanai dari dana desa kepada seluruh masyarakat desa, dengan adanya transparansi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat desa kepada pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprisiami, Putriyanti. 2012. *Penerapan Otonomi Desa dalam Memperkuat Akuntabilitas Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Agrik Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo.*, Yogyakarta : UNY
- Abidin, 2015. *Indeks Kemandirian Desa: Metode, Hasil dan Alokasi Program Pembangunan.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Benu, Simon Defri 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Wilayah Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten Timur Tengah Selatan Tahun 2016.* Tesis Pascasarjana Universitas Katolik Widya mandira Kupang.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya, Edisi kedua* (Cetakan keenam). Jakarta: Kencana, Prenada Media Group.
- Dwiyanto, Agus. 2002. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Galang Printika, Yogyakarta
- Fuad, Noor, dkk. 2004. *Dasar-dasar keuangan publik.* Jakarta: LPKPAP-Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- Ghozali, Imam. 2006. *Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang
- Halim, Abdul. 2012. *Manajemen Keuangan daerah.* Yogyakarta: UPT STIM YKPN
- Halim, Abdul. 2016. *Manajemen Keuangan Sektor Publik.* Jakarta: PT. Salemba Emban Patria
- Haryanto, Sahmuddin, dan Arifuddin. 2007. *Akuntansi Sektor Publik.* Edisi Pertama: Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hasniati, 2016. *Membangun Kekuatan Masyarakat.* Bandung: Puspaga.
- Istijanto. 2005. *Pengertian Populasi dan Sampel Penelitian* Jakarta
- Kaho, Yosef Riwu. 1997. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, PT. Gravindo Persada, Jakarta.

- Khusaini, Mohammad. 2006. *Ekonomi publik desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah*. Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Kasmir, 2008. *Analisis Laporan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI 2000, *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*, LAN BPKP RI, Jakarta.
- Lestari, Sri. 2017. *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono)*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Surakarta
- Levis, Leta Ravael. 2013. *Metode Penelitian Prilaku Petani*, Maumere, Ledalero.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta
- Makalalag, Astri, Juanita. 2016. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Mobago Sselatan*. Tesis Pascasarjana Univeritas Sam Ratulangi Manado
- Mardiasmo. 2002, *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2006. *Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*, Jurnal Akuntansi Pemerintahan, Vol. 2, No. 1, Mei 2006, Hal 1 – 17
- Manar, Dzunuwanus Gulam. 2015. *Mempertegas Akuntabilitas*, Bandung, Prosiding Fisip Unikom.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mulyadi, 2001. *Akuntansi Manajemen : Konsep, Manfaat dan Rekayasa*, Edisi Tiga Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Nafidah, Lina Nasihatun 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2014*. STIE PGRI Dewantara Jombang
- Nurcholis, 2011. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.

- Peraturan Pemerintah Nomor PP 43/2014. tentang *Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014 dan PP 47/2015 tentang Perubahan atas PP 43/2014.*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/2016. tentang *Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/2015. tentang *Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113/2014 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa.*
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang *Pedoman Pembangunan Desa*
- Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 Tentang *Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa*
- Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 Tentang *Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang *Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa*
- Putriyanti, Aprisiami 2012, "*Penerapan Otonomi Desa Dalam Menguatkan Akuntabilitas Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Aglik* ", Tesis S-2 Universitas Negeri Yogyakarta (*tidak dipublikasikan*).
- Riyanto, 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Sabarnpo, 2007. *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. Malang: UMM Press.
- Subroto, Agus 2009, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*, Tesis S-2 Pascasarjana UNDIP Semarang (*dipublikasikan*).
- Sukei,. 2007. *Akuntansi Desa*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Gava media, Yogyakarta.
- Sulistiyani, A.T. 2011. *Memahami Good Governance: Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Gava Media. Yogyakarta.
- Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh.

- Suwardjono, 2012. *Teori Akuntansi Perekayasa Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga BPFE, Yogyakarta
- Sumaryadi, I Nyoman. 2010. *Sosiologi Pemerintahan .Dari Perspektif pelayanan, Pemberdayaan, interaksi dan System Kepemimpinan Pemerintahan, Indonesia*. Jakarta Ghalia Indonesia.
- Sujarweni, V. W. 2015. *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Desa*
- Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang *Desa*
- Widjaya, HAW. 2005a. *Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh*. Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Waterston, Conyers. 1994. *Perencanaan Pembangunan Daerah Menuju Era Otonomi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.